

Relasi Agama dan Demokrasi; Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam Di Indonesia*

(The Relationship between Religion and Democracy; Critical Study of the Existence of
Islamic Parties in Indonesia)

Nur Khasanah,¹ Achmad Irwan Hamzani²

¹IAIN Pekalongan, ²Universitas Pancasakti Tegal



[10.15408/sjsbs.v6i4.13745](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13745)

Abstract

This study discusses the relation between religion and democracy; critical examination of the existence of Islamic parties in Indonesia. This study is a qualitative study based on library (library research). The approach used is descriptive qualitative which aims to illustrate or describe the reality that exists or what is happening or the actual reality of the object under study. Then interpreted in the form of a report. The approach used is the cultural anthropology approach. The results of this study indicate that Muslims interpret the relationship of religion and democracy to occur in three models, namely the negative, neutral and positive models. In the context of Islamic political parties in Indonesia, the basic problem is the inability of parties to package democratic issues, starting from the emergence of religious sentiment, politicization of religion, political pragmatism in PKS parties. Furthermore, the PPP party has problems with party regeneration, leadership dualism, and political attitudes. Whereas the UN party is seen in the absence of a leader figure and political culture.

Keywords: Religion, Democracy, Islamic Party

Abstrak

Studi ini membahas tentang relasi agama dan demokrasi; telaah kritis eksistensi Partai-Partai Islam di Indonesia. Kajian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Kemudian diinterpretasikan dalam bentuk laporan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kaum muslim memaknai bahwa relasi agama dan demokrasi terjadi dalam tiga model, yakni model negatif, netral, dan positif. Dalam konteks partai-partai politik Islam di Indonesia, problem mendasar adalah ketidakmampuan partai dalam mengemas isu-isu demokrasi, mulai dari muncul sentimen keagamaan, politisasi agama, pragmatisme politik pada partai PKS. Selanjutnya pada partai PPP terdapat masalah pada kaderisasi partai, dualisme kepemimpinan, dan sikap politik. Sedangkan pada partai PBB terlihat pada ketiadaan figur pemimpin dan kultur politik.

Kata Kunci: Agama, Demokrasi, Partai Islam

*Diterima: 14 November 2019, Revisi: 11 Desember 2019, Diterima 17 Desember 2019.

¹ Nur Khasanah adalah dosen tetap pada IAIN Pekalongan Jawa Tengah. Email: nur.khasanah@iain.pekalongan.ac.id

² Achmad Irwan Hamzani adalah dosen tetap pada Universitas Pancasakti, Tegal, Email: ai_hamzani@upstegal.ac.id

Pendahuluan

Agama dan demokrasi merupakan salah satu permasalahan yang banyak dikupas para ahli dalam berbagai disiplin ilmu, baik politik, sosial budaya, bahkan filsafat. Agama dan demokrasi menjadi barang yang paling laku dari masa lalu sampai sekarang ini, dan menjadi kebutuhan individu, masyarakat dan/bahkan negara dalam merealisasikan cita-cita. Agama dan demokrasi kadangkala justru berseberangan ketika memasuki sebuah sistem politik. Agama tentu saja bagian dari kebudayaan (demokrasi) dalam perspektif antropologi.

Agama merupakan suatu kekuatan yang berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Agama memancarkan nilai-nilai atau jiwa keagamaan pada pemeluknya. Agama menjadi penuntun dan penerang bagi segenap umatnya. Agama bukanlah sesuatu yang abstrak, dan mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia dan merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita ideal manusia sejadad karena wacana demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Dalam kondisi demikian ini, hubungan antara agama dan demokrasi tetap merupakan hubungan yang bersifat *intersectional*, yang berarti hubungan persinggungan antara agama dan demokrasi, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Bahkan legitimasi agama tetap diperlukan dalam pelbagai aspek kehidupan berbangsa dan negara yang di dalamnya sistem demokrasi sebagai salah satu instrumen politiknya. Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik membahas relasi agama dan demokrasi dalam konteks eksistensi partai-partai Islam di Indonesia. Karena sejak demokrasi dijadikan sebagai sistem yang digunakan untuk pergantian kekuasaan melalui mekanisme pemilu, eksistensi partai-partai Islam tidak pernah mampu melampaui partai-partai sekuler atau nasionalis.

Relasi Agama dan Demokrasi

Term relasi agama dan demokrasi pada dasarnya bukan barang baru. Bahwa ada kaitan yang erat antara agama dan demokrasi tidaklah dapat dibantah. Bahkan, banyak ahli mengatakan bahwa agama dan demokrasi ibarat dua sisi sekeping uang logam, di mana ada agama, di situ ada demokrasi. Agama dan demokrasi saling mengisi ruang kehidupan manusia dari masa ke masa. Agama memberi makna kepada individu manusia dan kelompoknya, agama juga memberikan harapan kelanggengan dan kebahagiaan hidup setelah meninggal. Agama bisa menjadi sarana untuk mengangkat dirinya dari penderitaan kehidupan duniawi dan mengantarkannya mencapai kemandirian spiritual. Agama memperkuat norma-norma kelompok dan sanksi moral kepada individu, serta menjadi dasar persamaan tujuan dan nilai-nilai yang melandasi keseimbangan masyarakat.³

³ Arief Rifkiawan Hamzah; & Heri Cahyono, "Agama dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam", Fikri, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 426. Lihat juga: Zahrotunnimah, Nur Rohim Yunus, Ida

Sedangkan demokrasi asal katanya berasal dari kata “*demos*”, sebuah kosa kata Yunani berarti masyarakat, dan “*kratio*” atau “*krato*” yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti “pemerintahan oleh rakyat” (*rule by the people*).⁴ Demokrasi merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat dalam sebuah masyarakat. Pada sistem ini, rakyat adalah sumber kekuasaan dan kedaulatan, rakyat yang memegang kedaulatan baik itu di level legislatif maupun pemerintahan eksekutif.⁵ Dalam studi tentang demokrasi, dikenal dua macam pemahaman, yaitu, pemahaman secara normatif dan secara empirik. Pemahaman normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan mengajarkan tentang nilai-nilai ideal bagaimana seharusnya demokrasi diwujudkan. Sedangkan pemahaman empirik atau demokrasi prosedural adalah rumusan demokrasi yang telah dilaksanakan.⁶ Maka dalam konteks ini, aplikasi dan implementasi demokrasi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain.

Upaya mencari relasi antara agama dan demokrasi agaknya tidak selalu gampang dan mudah. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia sejumlah ideologi pernah mengemukakan kritik pada agama, dengan menyatakan bahwa agama sebenarnya tak lebih dari keluh. Karena agama hanya semacam sentimen suatu dunia yang tak berkeprimanusiaan maka ia mampu sekadar memberi pemenang sementara sehingga tidak berhasil membongkar faktor-faktor yang menimbulkan penderitaan.⁷ Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara agama dan Demokrasi. Agama diyakini sebagai sistem kepercayaan yang mengajarkan kesetiaan total manusia kepada Tuhan secara vertikal. Sementara demokrasi, sebagai sebuah seni dalam kekuasaan, adalah konsepsi produk manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis serta absolut, dan senantiasa mengasumsikan proses tawar-menawar antara sesama manusia secara horizontal.

Aktualisasi prima sikap keberagamaan adalah berupa penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sedangkan pemenuhan demokrasi terwujud pada kesediaan berkompromi dengan menanggung kehendak orang lain seraya mengorbankan sebagian kehendak lainnya. Demokrasi berarti menempatkan kehendak dan rasionalitas manusia yang terlembagakan sebagai acuan perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam kehidupan beragama yang dijadikan acuan terakhir dan tertinggi adalah ajaran Tuhan.

Titik pertemuan agama dan demokrasi dapat dilihat pada fenomena dan realitas budaya dengan manusia sebagai subyeknya. Meskipun agama itu datangnya

Susilowati, “Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik,” *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 2, No. 2 (2018).

⁴ Kiki Muhamad Hakiki, “Islam dan Demokrasi.....”, h. 2. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, “Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” *Sosio Didaktika; Sosial Science Educational Journal*, Volume 2, No. 2 (2015)

⁵ Ahmad Ali Nurdin, “Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi”, *Jurnal Review Politik* Volume 06, No. 01, Juni 2016, h. 4. DOI: <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1>

⁶ Baco Sarluf dan Usman Wally, “Theo-Demokrasi dalam Pandangan Abu A’la al-Maududi”, *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, h. 3.

⁷ Abdullah, “Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan”, *Jurnal Politik Profetik* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014, h. 28.

dari Tuhan, tetapi makna dan aktualisasi agama baru akan berwujud, ketika agama itu dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh pemeluknya dalam realitas budaya. Dalam agama konsepsi manusia sebagai realitas tidaklah bersumber dari pengetahuan, tetapi dari kepercayaan pada suatu otoritas mutlak. Namun agama merupakan suatu realitas sosial, ia hidup dan termanifestasikan di dalam masyarakat.⁸ Dengan demikian, ketika agama diwahyukan kepada manusia, maka ia sudah terlibat dalam proses kompromi dan tawar-menawar dengan norma-norma budaya yang melembaga dalam kehidupan manusia.

Pada realitas kehidupan sering ditemukan ajaran agama menggeser nilai-nilai budaya sebelumnya. Tetapi tidak jarang justru karena agama, maka nilai dan identitas budaya sebuah masyarakat menjadi terlestarikan oleh praktek keberagamaan masyarakatnya. Di sini agama telah berperan menjadi bingkai dan penyubur budaya sebuah masyarakat. Oleh karena itu, agak *absurd* untuk mengklaim adanya fenomena dan praktek keagamaan yang murni, tanpa terjadi interaksi dan akulturasi nilai-nilai budaya lokal di mana agama itu dipraktekkan.

Selain itu, misi agama dan cita-cita demokrasi adalah pendidikan dan pelayanan pada masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya melalui pranata masyarakat dan negara, maka agama dan demokrasi dapat saling mengisi. Agama memberikan pedoman moral dan daya imperatif yang bersifat transenden yang datang dari atas. Sementara itu demokrasi merupakan dinamika etis kemanusiaan yang datang dari bawah. Agama tanpa budaya bagaikan roh tanpa tubuh. Sementara itu budaya tanpa agama akan mudah terjadi menjadi medan konflik para hedonis, yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya, karena tidak adanya nilai acuan yang bisa mengatasi keterbatasan dan absurditas pandangan hidup yang sekularistik dan nihilistik.

Semakin tinggi tingkat keberagamaan seseorang, akan semakin tinggi apresiasinya terhadap demokrasi. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi kadar penghayatan demokrasi seseorang, akan semakin toleran ia menghadapi pluralisme keberagamaan. Salah satu dorongan mengapa keperluan terhadap etika demokrasi yang sehat semakin mendesak, antara lain ialah adanya kenyataan, bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralistik baik dari segi ras, agama, budaya, suku, bahasa maupun agama.

Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa setidaknya ada tiga model relasi agama dan demokrasi.⁹ *Pertama*, relasi yang bersifat negatif. Relasi ini mendapat dukungan dari Karl Marx, Nietzsche dan Sartre. Mereka pada umumnya beranggapan bahwa agama adalah kekuatan konservatif yang senantiasa membelenggu penalaran dan kemerdekaan manusia, yang karenanya bertentangan dengan demokrasi yang mendukung otonomi manusia. Teori ini dalam tradisi intelektual Islam didukung oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak

⁸ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia; Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999, h. 11

⁹ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998, h. 10-16.

bagi paham demokrasi seperti Syaikh Fadhallah Nuri dan Thabathabai dari Iran, Sayyid Qutb dan al-Sya'rawi dari Mesir, serta Ali Benhadj dari Aljazair.¹⁰ Lebih dari itu sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang kompleks dan komprehensif, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini, maka tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Allah dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus suara mayoritas.¹¹

Kedua, relasi yang bersifat netral. Pada relasi ini dipahami bahwa urusan agama dan urusan politik berjalan sendiri-sendiri. Teori ini lebih populer dengan istilah "sekularisasi politik." Ciri pokok teori ini adalah bahwa kehidupan (sekuler) menekankan prinsip rasionalitas dan efisiensi yang diberlakukan dalam bidang kehidupan faktual-empiris, sehingga pada gilirannya agama semakin tersisih dan menjadi urusan pribadi. Biarkanlah agama dan politik menjalankan peran dan dialektikanya masing-masing. Contoh paling menonjol dari teori ini adalah proses Pemilu di Amerika Serikat yang dengan pendekatan rasional-humanistik, agama tidak diikutsertakan. Alasannya adalah bahwa seandainya agama disertakan dalam Pemilu, maka masing-masing agama akan tampil dengan emosi keagamaannya, yang selanjutnya Pemilu akan menjadi ajang peperangan, di mana masing-masing kelompok agama ingin menang dengan mengatasnamakan Tuhan. Pendapat ini di kalangan Islam, disokong oleh Fahmi Huwaidi, al-'Aqqad, Muhammad Husein Haikal, dan Zakariyah Abdul Mu'in Ibrahim al-Khatib dari Mesir, Mahmoud Mohammed Thaha dan Abdullah Ahmad al-Na'im dari Sudan, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, dan Hasan al-Hakim dari Uni Emirat Arab.¹²

Dalam konteks Indonesia sekularisasi politik itu dilakukan dengan tema "de-ideologisasi politik", terutama dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berimplikasi pada pelarangan simbol-simbol agama dalam politik. Meski terjadi proses sekularisasi politik yang sangat kuat pada saat itu, dalam masyarakat tidak terjadi sekularisasi yang berarti, karena umat Islam tetap memiliki orientasi keagamaan dan melakukan sosialisasi ajaran-ajaran agama secara kultural.¹³

Ketiga, relasi yang bersifat positif. Pada relasi ini dipahami bahwa bahwa agama sangatlah mendukung proses demokratisasi, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Teori ini sering disebut dengan Teo-Demokrasi, yaitu demokrasi yang mempertimbangkan nilai-nilai transendental. Dalam istilah al-Maududi Teo-Demokrasi adalah sistem pemerintahan demokrasi ilahi, suatu sistem kedaulatan

¹⁰ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis)*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2002, h. 47.

¹¹ Abdullah, "Hubungan Agama.....", h. 29.

¹² Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi.....*, h. 53.

¹³ Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama", h. 250.

rakyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan lewat syariat-Nya.¹⁴ Semua agama, menurut teori ini, muncul dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Aktualisasi dari misi ini adalah terwujudnya keadilan dan kemerdekaan bagi para pemeluknya. Dalam kondisi ini, demokrasi dan proses demokratisasi merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya keadilan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktik demokrasi, namun agama senantiasa menjadi etos, spirit dan muatan doktrinal bagi tumbuhnya kehidupan demokratis.

Teo-demokrasi beranggapan bahwa, baik secara teologis maupun sosiologis, sangat mendukung proses demokrasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Oleh karena itu, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktek demokrasi namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis. Meskipun agama berasal dari Tuhan, tetapi pada pelaksanaannya tetap melibatkan peranan manusia. Maka disinilah perlunya penafsiran secara terus menerus terhadap “teks-teks agama” guna melestarikan alam ciptaan Tuhan.¹⁵

Demokrasi dalam Islam disebut dengan istilah *syura*, berasal dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang bermakna menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Ada bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawara* adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syawir* (memberi pendapat, musyawarah), dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain). Dengan demikian *Syura* atau *musyawarah* didefinisikan sebagai saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.¹⁶

Abdurrahman Wahid lebih jauh menyatakan bahwa relasi antara agama dan demokrasi sangat erat. Bahkan Islam merupakan agama demokrasi, dengan tiga argumentasi antara lain; *Pertama*, Islam adalah agama hukum dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang tertinggi sampai rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kalau tidak, maka hukum dalam Islam tidak berjalan dalam kehidupan. *Kedua*, Islam memiliki asas permusyawaratan. Dengan demikian, tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. *Ketiga*, Islam berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan akhirat. Maka dapat dipastikan bahwa

¹⁴Muhammad Zulifan, “Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini”, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 190. DOI: <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6583>

¹⁵Syaifulloh, “Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi”, *Al Fikr*, Vol. 15, No. 3, Tahun 2011, h. 531

¹⁶Mufiqur Rahman, “Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia)”, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, h. 16.

Islam selalu menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati diri Islam sebagai agama hukum.¹⁷

Pendapat senada dikemukakan Fahmi Huwaidi bahwa, demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah; *Pertama*, beberapa hadis menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. *Kedua*, penolakan Islam kepada kediktatoran. *Ketiga*, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. *Keempat*, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan *Khulafa al-Rashidin* yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. *Kelima*, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. *Keenam*, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran. *Ketujuh*, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.¹⁸

Kasus Partai-Partai Islam di Indonesia

Relasi agama dan demokrasi pada kasus partai-partai islam di Indonesia merupakan kajian yang selalu menarik. Karena hubungan tersebut merupakan refleksi hubungan antara agama yang dianut mayoritas penduduk dengan demokrasi sebagai sistem yang dipilih negara untuk pergantian kekuasaan dalam pengelolaan negara yang di dalamnya berkompetisi berbagai partai politik termasuk partai-partai Islam. Partai-partai Islam di Indonesia sejak sistem demokrasi sebagai bagian dari proses di dalamnya senantiasa mengalami pasang surut perolehan suara. Puncaknya pada pemilu 2009 dan 2014 dimana perolehan suaranya kurang dari 35 persen jauh di bawah partai-partai nasionalis. Bahkan banyak analis meyakini bahwa Indonesia bukan lahan subur bagi politik Islam. Kegagalan partai-partai Islam dianggap mencerminkan berakhirnya era politik aliran di Indonesia (*the end of ideology*).¹⁹ Dengan demikian, penurunan suara partai-partai Islam mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim, namun fakta itu tidak berkorelasi positif terhadap tingkat keterpilihan partai-partai Islam.²⁰ Kemerosotan suara partai-partai Islam memperlihatkan gagalnya “teori demokrasi.”

Relasi agama dan demokrasi dalam konteks partai-partai Islam di Indonesia masih mengalami problematika. Di lihat dari pendekatan antropologi dengan melihat

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi*, Jakarta: PT. Erlangga, 1999, h. 87-89

¹⁸ Kiki Muhamad Hakiki, “Islam dan Demokrasi.....”, h. 5

¹⁹ Mohammad Iqbal Ahnaf, “Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi dan Revolusi”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2 (Juli 2016), h. 128. DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.728>

²⁰ Muhammad Zulifan, “Politik Islam di Indonesia.....”, h. 194.

dan memahami wujud praktek keagamaan di masyarakat,²¹ setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi, antara lain:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lahir dari atas prakarsa Jama'ah Tarbiyah pada 9 Agustus 1998. Pada awalnya, bernama Partai Keadilan (PK). Perubahan dilakukan pada 20 Juli 2003 setelah PK gagal memenuhi electoral threshold (2%) pada Pemilu 1999 dan hanya memperoleh 1,3% suara.²² Partai PKS secara sosiologis menghadapi berbagai dilema dalam implementasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, antara lain:

Pertama, sentimen keagamaan (*religious sentiment*). PKS sejak awal memiliki hubungan khusus dengan Timur Tengah. Karenanya pengaruh ideologi Timur Tengah di partai ini sangat terlihat dari isu dan kebijakan yang diangkat. Sehingga terlihat ada kesamaan prinsip dan semboyan antara PKS dan Ikhwanul Muslimin seperti slogan Islam adalah solusi, tidak lagi mengkotak-kotakkan antara nasionalisme dan Islam, serta juga masalah-masalah internasional lainnya. Di titik inilah PKS sering dicurigai dan dianggap tidak nasionalis dan anti Pancasila. Karena faham-faham Timur Tengah tersebut dianggap tidak sesuai dengan *Nation Building* dan menjadi ancaman serius kebhinekaan Indonesia.²³ Belum lagi justifikasi berbagai kalangan yang menganggap bahwa PKS mengembang misi fundamentalisme dan berusaha menegakkan sistem khilafah.²⁴ Tidak sesuai dengan *Image* PKS sebagai "Partai Dakwah"²⁵, sehingga mengalami degradasi moral di mata masyarakat, terutama keterlibatan beberapa kadernya dalam pusaran korupsi, termasuk mantan ketua umumnya.²⁶

Kedua, Politisasi Agama (*Politicization of Religion*). PKS termasuk salah satu partai yang diklaim senantiasa memainkan isu-isu agama, terutama yang berasal dari Timur Tengah, seperti kekejaman Israel atas negara Palestina, Syiria, dan lain-lain. Sejak awal para sosiolog seperti Danoye, Hakeem Onapajo, Willie Gin, David dan Lyman menyakini bahwa ada pengaruh agama dalam kehidupan politik. Agama digunakan sebagai mobilisasi massa untuk kepentingan politik dan kekerasan pasca pemilu. Para tokoh dan lembaga agama memainkan peran untuk masuk dalam ranah

²¹ M. Dimiyati Huda, "Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam", *Didaktika Religia*, Volume 4, No. 2 Tahun 2016, h. 153. DOI : 10.30762/didaktika.v4.i2.p139-162.2016

²² Abu Rokhmad, "Dasar Negara dan *Taqiyyah* Politik PKS", *Walisongo*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, h. 11. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.22.1.255>

²³ Mohammad Riza Widyarsa, Syafiuddin Fadlillah, Randi M. Ramdhani, Fahmi Salsabilla, "Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia Terhadap Partai Politik di Indonesia. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 1, No. 1, Maret 2011, h. 31.

²⁴ M. Faishal Aminuddin, "Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010, h. 134.

²⁵ Erfina Nurussa'adah, "Nilai Keterbukaan Ideologi Partai Islam dalam Perspektif Komunikasi Politik", *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, h. 975.

²⁶ Gonda Yumitro, "Partai Islam dan Dinamika Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, No. 1, Juli 2013, h. 43. DOI. <https://doi.org/10.22146/jsp.10892>

politik. Pasca kerusuhan pemilu, lembaga agama mampu menjadi fasilitator perdamaian dari pada menggerakkan konflik komunal.²⁷

Penggunaan isu-isu agama yang dilakukan PKS kadangkala tidak tepat dan cenderung diasumsikan akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena banyak tindakan yang dilakukan berseberangan dengan Islam yang khas ala Indonesia. Apalagi ditambah isu-isu Islamisme sebagai ancaman yang digembarkan akademisi Barat²⁸, turut serta mengikis isu-isu agama yang diemban PKS. Dilihat dari strategi dakwah, jihad, dan perjuangan, PKS memang rapi dan sistematis, di mana dalam gerakannya melalui aksi dan pemikiran politik dengan membangun opini publik kepada lapisan masyarakat melalui tulisan dan gerakan. Strategi tersebut secara kasat mata tidak berpengaruh terhadap perubahan ideologi negara, tetapi secara radikal konseptual merupakan bagian strategi mengubah ideologi negara.²⁹

Ketiga, pragmatisme politik (*Political Pragmatism*). Dalam konteks ini PKS sering terjebak pada pragmatisme politik, tercatat beberapa kali partai-partai Islam membangun koalisi politik dengan partai-partai lainnya meskipun terdapat perbedaan visi dan ideologi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); sebuah partai nasionalis-sekuler dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muko-Muko provinsi Bengkulu. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah di Manggarai Barat provinsi Nusa Tenggara Timur, PKS mengajukan pasangan calon yang didukung oleh Partai Damai Sejahtera yang memiliki basis pemilih umat Kristen. Padahal, mestinya partai-partai Islam dapat membangun koalisi di antara mereka sendiri. Dalam Islam, kepemimpinan politik adalah hak eksklusif umat Islam.³⁰

2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai persatuan pembangunan (PPP) didirikan pada tanggal 5 januari 1973 dengan asas Islam. Partai ini merupakan hasil fusi empat partai Islam sebelumnya yaitu NU, PERMUSI, PSII, Dan PERTI.³¹ PPP di didirikan untuk mawadahi berbagai kepentingan umat Islam. PPP memandang Islam sebagai *way of life* dan menjadikan Islam sebagai asas partai secara tegas dan formal.³² PPP dalam perkembangannya mengalami berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan relasi agama dan demokrasi yang disebabkan atas berbagai faktor antara lain:

²⁷ Mohammad Supriyadi, "Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan *Rational Choice Theory*", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. I, No. 3, 2015, h. 402.

²⁸ Syahrir Karim, "Islamisme dan Konstruksi Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Hizb Tahrir Indonesia di Sulawesi Selatan", *Jurnal Review Politik*, Volume 06, 01, Juni 2016, h. 91. DOI: <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1>

²⁹ Syahrir Karim, "Islamisme dan Konstruksi Gerakan.....", h. 115.

³⁰ Mohamad Latief, "Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia", *Tsaqafah; Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, h. 14. DOI. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974>

³¹ Feri Arawan, "Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2014-2016", *JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1 – April 2018, h. 2.

³² Moh. Nurhakim, "Pemaknaan Agama dalam Partai Politik dalam Konteks Reformasi; Studi Perbandingan PPP, PKB, dan PAN", *Humanity*, Volume 1, Nomor 1, September 2005, h. 64.

Pertama, kaderisasi partai (*party regeneration*). Partai PPP terkesan sebagai partainya orang-orang tua, kaderisasi di partai PPP tidak jalan. Oleh karena itu, PPP membutuhkan kader muda untuk melakukan pembaruan dan mendinamisasikan partai.³³ *Kedua*, Dualisme Kepemimpinan (*Dualism of Leadership*). PPP disinyalir sangat miskin dengan sosok yang bisa dijadikan figur yang bisa menyatukan anasir-anasir politik Islam. Salah satu penyebab ketiadaan figur pemimpin ini adalah kuatnya intervensi penguasa untuk memecah belah solidaritas PPP melalui figur pimpinan yang direkasaya.³⁴ Konsekuensinya, PPP senantiasa terjadi konflik di internal partai itu sendiri dan berimbas pada senantiasa terjadi dualisme kepemimpinan. Hal ini tentu saja mempengaruhi sikap politik dan kecenderungan masyarakat untuk memilih PPP dalam setiap konstalasi politik dilaksanakan.

Ketiga, sikap politik (*political attitude*). PPP sering dianggap sebagai salah satu partai yang senantiasa berdiri di dua kaki. Menjadi sangat pragmatis demi sebuah jabatan tertentu. Hal ini terlibat jelas pada seringnya lompat pagar PPP dari koalisi keumatan yang digagas partai-partai Islam. Sikap ini tentu saja memancing apatisme masyarakat terhadap PPP yang tentu saja berimbas pada ketidakmauan masyarakat tersebut untuk memilihnya dalam setiap pesta demokrasi. Diperparah dengan perilaku sebagian anggota dan pengurus tidak mencerminkan partai Islam sesungguhnya. Aliran dana untuk DPR termasuk yang tidak jelas asalnya, juga diterima oleh sebagian partai PPP. Alasannya, nanti akan dikembalikan kepada rakyat yang menjadi konstituennya. Hal ini menambah pemahaman masyarakat tentang sulitnya membedakan antara partai Islam dengan partai bukan Islam.³⁵

3. Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang (PBB) didirikan pada tanggal 17 Juli 1998 sebagai partai penerus estapet kepemimpinan Masyumi di kancah perpolitikan Indonesia. Tujuan didirikan partai PBB adalah untuk membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan asal usul keturunan, agama, maupun golongan sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamien*.³⁶ Sebagai salah satu partai Islam, PBB juga menghadapi berbagai problema akut dalam konteks relasi agama dan demokrasi, sehingga menyebabkan eksistensi PBB senantiasa tidak sampai 2 %. Adapun berbagai masalah PBB adalah sebagai berikut:

Pertama, ketiadaan figur pemimpin (*absence of leader figures*). PBB merupakan partai yang sangat tergantung kepada Pendiri dan Ketua Umumnya, Yuzril Izha Mahendra. Akibatnya, PBB senantiasa dalam bayang-bayang Yuzril, dan tidak ada figur lain yang mampu menggantikan posisinya. Keterbatasan ini menyebabkan PBB

³³ Soefihara Endin AJ., *Merebut Nurani Rakyat, Koalisi, Konflik dan Etika Politik*. Jakarta: Blantika, 2005, h. 12.

³⁴ Soefihara Endin AJ., *Merebut Nurani.....*, h. 8.

³⁵ Sudarno Shobron, "Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, h. 15. DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2004>

³⁶ Yudi Pramoko, *Yuzril Izha Mahendra; Sang Bintang Cemerlang Perjuangan Menegakkan System dan Akhlak Berpolitik*, Jakarta: Putera Berdikari Bangsa, 2000, h. 70.

sulit berkembang dan melakukan improvisasi dan berkreaitivitas dalam mengusung isu-isu aktual keumatan yang berbasis pada kesadaran fundamental umat Islam akan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini berimbas pada sikap umat kepada PBB.

Kedua, Kultur Politik (Political Culture). Sebagai pewaris Masyumi idealnya PBB sudah ada konstituen pasti dalam setiap pesta demokrasi. Akan tetapi pasca dibubarkan Orde Baru, Masyumi tidak pernah lagi menjadi mesin Politik, mesin politik lebih banyak dikembalikan kepada dua organisasi terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, yang notabene sudah diwakili partai PKB dan PAN. Konsekuensinya, PBB kehilangan massa ideal dalam setiap konstalasi pesta demokrasi.

Menurut Gonda Yumitro eksistensi partai-partai Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain; *Pertama*, berkaitan dengan karakter pemahaman Islam di Indonesia. Selama ini Islam lebih banyak dimaknai dalam artian ritual dibandingkan dengan pelibatan agama dalam semua dimensi kehidupan. *Kedua*, kemunduran dukungan terhadap partai Islam disebabkan perpecahan yang terjadi di antara umat Islam sendiri. Bahkan dalam artian politik, Zachary Abusa mengklasifikasikan gerakan Islam di Indonesia menjadi beberapa jenis, seperti gerakan khalifah, pendirian negara Islam, dan kelompok pluralis demokrasi. Secara sederhana kelompok tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung dan penentang demokrasi. Kelompok yang mendukung demokrasi adalah mereka yang tergabung dalam partai-partai Islam seperti PKS, PPP, PBB, PBR, PAN dan PKB. Sementara kelompok yang menentang demokrasi meliputi Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Salafi, dan Hizbut Tahrir. Karena perbedaan pola gerakan antara yang mendukung dan menolak demokrasi, maka seperti dapat dilihat di lapangan, antara satu kelompok dengan lainnya pun belum maksimal dalam menyinergikan gerakan dakwah mereka. Tak jarang, di antara sesama mereka membongkar aib dan kelemahan kelompok yang lain. *Ketiga*, ketidakmampuan partai-partai Islam untuk menyelesaikan persoalan riil yang terjadi di tengah masyarakat, seperti isu kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Walaupun partai-partai sekuler kondisinya hampir sama tetapi mereka mampu menampilkan diri dengan lebih menarik.³⁷

Perubahan zaman menciptakan budaya baru yang menuntut umat Islam untuk cepat-cepat meresponnya, agar fungsi agama di tengah-tengah kehidupan umat Islam selalu relevan dan selalu memberikan solusi konkrit terhadap persoalan yang dihadapi dalam budaya yang berbeda.³⁸ Demokrasi sebagai salah satu persoalan universal manusia, di dalam pemikiran Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep hubungan negara dan masyarakat (*state and society*). Demokrasi muncul ke permukaan sebagai sebuah wacana dalam dunia Islam setelah Perang Dunia II, terutama ketika negara-negara Islam berjuang melawan penindasan, baik dari kaum Kolonial maupun dari

³⁷ Gonda Yumitro, "Partai Islam.....", h. 43-44.

³⁸ Arief Rifkiawan Hamzah dan Heri Cahyono, "Agama dan Tantangan", h. 424.

sesama mereka. Jadi, demokrasi sesungguhnya bukan konsep asli yang berasal dari peradaban Islam, tetapi dari peradaban Barat.³⁹

Walaupun demikian, beberapa prinsip tentang demokrasi disetujui dan disepakati oleh setiap orang yang membicarakan atau menulis konsep demokrasi. Prinsip-prinsip itu termasuk persamaan hak politik, respon pemerintah terhadap keinginan publik, dipimpin oleh mayoritas pemilih, menjaga kebebasan manusia, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil yang terbuka bagi masyarakat. Setiap warga mendapatkan perlindungan dimata hukum, komitmen terhadap nilai-nilai toleransi, kerjasama dan kompromi.⁴⁰ Demokrasi merupakan sebuah kondisi yang dianggap paling ideal dari sebuah negara yang dicita-citakan oleh banyak kalangan. Tetapi upaya menuju demokrasi yang ideal merupakan sebuah proses yang tidak mudah.⁴¹

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kaitan yang erat antara agama dan demokrasi tidaklah dapat dibantah. Agama itu datangnya dari Tuhan, tetapi makna dan aktualisasi agama baru akan berwujud, ketika agama itu dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh pemeluknya dalam realitas budaya. Oleh karena itu, relasi agama dan demokrasi menjadi sebuah keharusan, walaupun ada banyak pro dan kontra di dalamnya, termasuk di kalangan umat Islam. Kaum muslim memaknai bahwa relasi agama dan demokrasi terjadi dalam tiga model, yakni model negatif, netral dan positif. Dalam konteks partai-partai politik Islam di Indonesia problem mendasar adalah ketidakmampuan partai dalam mengemas isu-isu demokrasi mulai dari muncul sentimen keagamaan (*religious sentiment*), politisasi agama (*Politicization of Religion*), pragmatisme politik (*Political Pragmatism*) pada partai PKS. Selanjutnya pada partai PPP terdapat masalah pada kaderisasi partai (*party regeneration*), Dualisme Kepemimpinan (*Dualism of Leadership*) dan sikap politik (*political attitude*). Sedangkan pada partai PBB terlihat pada ketiadaan figur pemimpin (*absence of leader figures*) dan kultur politik (*Political Culture*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia; Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina. 1999.
- Endin AJ. Soefihara. *Merebut Nurani Rakyat, Koalisi, Konflik dan Etika Politik*. Jakarta: Blantika. 2005.

³⁹ Toto Suharto, "Teo-demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban: Studi Komparatif Atas Respons S.M. Zafar dan Mehdi Bazargan Tentang Sistem Pemerintahan Islam", *Walisongo*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, h. 41. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.22.1.258>

⁴⁰ Ahmad Ali Nurdin, "Kaji Ulang Konsep.....", h. 5.

⁴¹Fuad Putera Perdana Ginting & Anwar Saragih, "Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia; Sebuah Kritik Terhadap Implementasi *Parliamentary Treshlod*", *Politeia; Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 2, 2018, h. 84. DOI: <https://doi.org/10.32734/politeia.v10i2.630>

- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina. 1998.
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis)*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratam. 2002.
- Wahid, Abdurrahman, *Islam, Negara dan Demokrasi*, Jakarta: PT. Erlangga. 1999.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Abdillah, Masykuri, "Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013. DOI: 10.15408/ajis.v13i2.937
- Abdullah, "Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan", *Jurnal Politik Profetik* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal, "Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi dan Revolusi", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2 (Juli 2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.728>
- Aminuddin, M. Faishal, "Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010.
- Arawan, Feri, "Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2014-2016", *JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1 – April 2018, h. 2.
- Ginting, Fuad Putera Perdana dan Anwar Saragih, "Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia; Sebuah Kritik Terhadap Implementasi *Parliamentary Treshlod*", *Politeia; Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 2, 2018. DOI: <https://doi.org/10.32734/politeia.v10i2.630>
- Hakiki, Kiki Muhamad, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016. DOI: <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583>
- Hamali, Syaiful, "Agama Dalam Perspektif Sosiologis", *Al-Adyan*, Vol.XII, N0.2, Juli-Desember 2017. DOI. <https://doi.org/10.24042/adyan.v12i2.2111>
- Hamzah, Arief Rifkiawan, dan Heri Cahyono, "Agama dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam", *Fikri*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Huda, M. Dimyati, "Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam", *Didaktika Religia*, Volume 4, No. 2 Tahun 2016. DOI : 10.30762/didaktika.v4.i2.p139-162.2016
- Karim, Syahrir, " Islamisme dan Konstruksi Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Hizb Tahrir Indonesia di Sulawesi Selatan", *Jurnal Review Politik*, Volume 06, 01, Juni 2016. DOI: <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1>
- Latief, Mohamad, "Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia", *Tsaqafah; Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017. DOI. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974>
- Nuridin, Ahmad Ali, "Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi", *Jurnal Review Politik* Volume 06, No. 01, Juni 2016. DOI: <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1>
- Nurhakim, Moh., "Pemaknaan Agama dalam Partai Politik dalam Konteks Reformasi; Studi Perbandingan PPP, PKB, dan PAN", *Humanity*, Volume 1, Nomor 1, September 2005.

- Nurussa'adah, Erfina, "Nilai Keterbukaan Ideologi Partai Islam dalam Perspektif Komunikasi Politik", *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018.
- Pramoko, Yudi, Yuzril Izha Mahendra; *Sang Bintang Cemerlang Perjuangan Meneggakan System dan Akhlak Berpolitik*, Jakarta: Putera Berdikari Bangsa.
- Rahman, Mufiqur, "Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia)", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017.
- Rokhmad, Abu, "Dasar Negara dan *Taqiyyah* Politik PKS", *Walisono*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.22.1.255>
- Sarluf, Baco dan Usman Wally, "Theo-Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la al-Maududi", *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*,
- Shobron, Sudarno, "Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013. DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2004>
- Suharto, Toto, "Teo-demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban: Studi Komparatif Atas Respons S.M. Zafar dan Mehdi Bazargan Tentang Sistem Pemerintahan Islam", *Walisono*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.22.1.258>
- Supriyadi, Mohammad, "Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan *Rational Choice Theory*", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. I, No. 3, 2015.
- Syaifullah, "Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi", *Al Fikr*, Vol. 15, No. 3, Tahun 2011.
- Widyarsa, Mohammad Riza, Syafiuddin Fadlillah, Randi M. Ramdhani, Fahmi Salsabilla, "Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia Terhadap Partai Politik di Indonesia. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, Maret 2011.
- Yumitro, Gonda, "Partai Islam dan Dinamika Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, No. 1, Juli 2013. DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.10892>
- Yunus, Nur Rohim. "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Sosio Didaktika; Sosial Science Educational Journal*, Volume 2, No. 2 (2015)
- Zahrotunnimah, Z.; Yunus, N.R.; Susilowati, I, "Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 2, No. 2 (2018).
- Zulifan, Muhammad, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini", *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 2, 2016. DOI: <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6583>